

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

✉ bkddankorpri@kepriprov.go.id

🌐 bkddankorpri.kepriprov.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin.... Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI (BKD dan KORPRI) Provinsi Kepulauan Riau ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.

Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BKD dan KORPRI di Tahun Anggaran 2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/050/12/BPPP/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023, dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Dalam penyusunan Ranhir Renja ini, BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau berkoordinasi, bersinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya.

Harapannya semoga dokumen Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197601232003122008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seperti diketahui pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu pada Tahun 2025 setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur maka akan disusun kembali RPJMD sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan tetap memperhatikan RPJP Provinsi Kepri dan Dokumen Perencanaan di atasnya. Ketika RPJMD disusun maka dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang lebih bersifat teknis yang menampung program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif juga harus disusun secara bersamaan yaitu Renstra SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 13 ayat (2) dalam Renja harus memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait dengan perencanaan program kegiatan tahunan yang menjadi tugas dari BKD dan KORPRI maka perlu disusun Renja Tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Renstra BKD DAN KORPRI Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 334 ayat (1) mempunyai tugas untuk “membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi. Dengan tugas tersebut, maka Renstra BKD dan KORPRI tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggungjawabkan kinerjanya dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya terdapat 14 amanat dalam manajemen PNS pasal (2) terdiri dari: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan Karier; Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan Tunjangan; Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; dan Perlindungan.

Untuk itu dalam penyusunan Renja BKD dan KORPRI Tahun 2026 tidak boleh lari dari acuan peraturan perundang-undangan yang menaungi dalam urusan kepegawaian yang sudah diterjemahkan ke dalam Renstra BKD dan KORPRI Tahun 2025-2029, yang termuat dalam tujuan, sasaran, kemudian diwujudkan dengan melalui strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan

dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam hal ini BKD dan KORPRI harus berkoordinasi, bersinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan serta pemangku kepentingan.

Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Renstra BKD dan KORPRI Tahun 2025-2029, dimana rencana program disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5881 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Kepegawaian Daerah.

Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Renja BKD dan KORPRI tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 –

2026. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
39. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga BKD dan KORPRI selama Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKD DAN KORPRI TAHUN 2024

Pada bab II menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD DAN KORPRI

Pada bab III menguraikan Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD DAN KORPRI

Pada bab IV mengemukakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKD dan KORPRI

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Subkegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja

Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 pada level baik hal ini dibuktikan dengan capaian realisasi fisik berada pada angka 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.762.730.608 (98,13%)** dari total pagu anggaran **Rp. 19.120.520.906** yang terdiri dari 34 Sub kegiatan 10 Kegiatan dan 2 program.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Tabel T-C 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Indikator Program) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Lembar : 1 dari 3

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program kepmendagri 050-5889 (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2024) (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
5				Urusan Pilihan						
5	03	02		Program Kepegawaian Daerah						
				Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00	40,00	40,00	95,3
					Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00	38,00	40,00	100

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program kepmendagri 050-5889 (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2024) (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
		Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	22,00	19,00	19,00	100	22,00	22,00	100
	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja	Nilai penggajian, penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00	40,00	40,00	100	40,00	40,00	100
		Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	78,00	77,50	77,50	100	78,00	78,00	100
	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan Karier	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	22,00	20,00	20,00	100	22,00	22,00	100

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Lembar : 1 dari 3

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program kepmendagri 050-5889 (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2024) (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
		Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Skor	83,00	80,00	80,00	100	83,00	83,00	100

Dari Tabel 2.1. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2024 dapat dilihat bahwa semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah:

- a. Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu sempit, khususnya kegiatan yang masuk anggaran Kas Triwulan IV.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun pada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak menjadi bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian digunakan Indikator Kinerja Utama yang berasal dari indikator program pembangunan meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Tabel T-C 30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan
BKD DAN KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasioanal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan			65,53	66,40	67,15	64,52 (98,46%)	n.a	
2	Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi			98,47	98,55	98,63	99,67 (101,22%)	n.a	
3	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik			99,01	99,02	99,03	99,77 (100,77%)	n.a	
4	Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional			4,43	6,53	12,98	4,46 (100,68%)	n.a	
5	Persentase ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi			9,26	11,54	14,00	9,05 (97,73%)	n.a	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada indikator program pertama Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan dengan target 65,53% dapat terealisasi sebesar 64,52%. Hal tersebut berdasarkan data jumlah ASN per bulan Desember 2023 sebesar 6.369 orang, ditambah dari jalur pengadaan CASN sebanyak 693 orang dan pengadaan pegawai melalui jalur pindah masuk instansi sebanyak 27 orang dan penempatan IPDN 4 orang, dikurang pegawai ASN yang diberhentikan 119 orang (Batas Usia Pensiun 115 orang, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 3 orang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 1 orang) dan pindah keluar sebanyak 10 orang. Selisih antara target dengan realisasi dikarenakan adanya pergeseran pelaksanaan CASN oleh Panselnas sehingga pengadaan pegawai dari jalur CASN tidak terealisasi.

Indikator program kedua Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi dengan target 98,47% dapat terealisasi sebesar 99,67%. Hal tersebut berdasarkan data jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi sebanyak 6.933 orang dari total jumlah ASN sebanyak 6.956 orang. Dimana masih terdapat 23 pegawai yang penempatannya belum sesuai kualifikasi Pendidikan yang terdiri dari pejabat administrator 2 orang, pejabat pengawas 6 orang, pelaksana 6 orang, dan pejabat fungsional 9 orang.

Indikator program ketiga Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dengan target 99,01% dapat terealisasi sebesar 99,77%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Penilaian Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja ASN. Data dari SIMANJA sebanyak 6.956 orang. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 6.937 orang memiliki penilaian kinerja Baik, sedangkan 19 orang memiliki kinerja Butuh Perbaikan.

Indikator program keempat Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional sesuai kualifikasi dengan target 4,43% dapat terealisasi sebesar 4,46%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan

Pembinaan Karir Pejabat Fungsional sebanyak 145 orang dari Pejabat Fungsional sejumlah 3.249 orang.

Indikator program kelima Persentase ASN yang mengikuti Penilaian Kompetensi dengan target 9,26% dapat terealisasi sebesar 9,05%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kompetensi pegawai diluar tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 250 orang yang telah mengikuti penilaian kompetensi dari jumlah pegawai 2.762 orang.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD DAN KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKD dan KORPRI
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur
dan Wakil Gubernur

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BKD dan KORPRI	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif Sasaran Manajemen ASN yang Profesional	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. 4. Manajemen Sumber Daya Aparatur belum terlaksana secara optimal terkait pembinaan dan pengembangan aparatur 5. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal 6. Belum optimalnya penegakan disiplin bagi pegawai.	1. Jumlah ASN di Lingkungan BKD dan KORPRI terbatas 2. Data kepegawaian masih terpisah dalam beberapa aplikasi 3. Kebutuhan ASN sesuai dengan Analisis jabatan belum terpenuhi. 4. Data kepegawaian secara digital belum terintegrasi dan lengkap.	1. Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian cukup membantu dalam penyelesaian masalah kepegawaian 2. Penilaian kemampuan ASN dengan Assesment 3. Proses pengadaan (recruitmen Pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manajemen Sumber Daya Aparatur belum terlaksana secara optimal terkait pembinaan dan pengembangan karir aparatur;
2. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal;
3. Penegakan disiplin pegawai serta penilaian kinerja pegawai yang belum optimal;

4. Belum terlaksananya pengisian Jabatan Administrasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
5. Belum tersedianya Informasi Penilaian Kinerja dan Profil Kompetensi Pegawai pada Sistem Informasi kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi Gubernur telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 5 misi. Salah satu misi yang didukung oleh BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Adalah **”Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”**.

Dalam RKPD Povinsi Kepri tahun 2026 telah ditetapkan Tema pembangunan 2026 yaitu : **“Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”**

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah Tahun 2025:

- a. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan;
- b. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana; dan
- c. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang kepegawaian yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan daerah maupun peraturan dari pemerintah yang akan menjadi target di tahun 2026 merupakan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Tabel T-C 31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEPEGAWAIAN										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Kepri	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100	15.530.518.520	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Kepri	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100	18.230.894.597	
2	Program Kepegawaian Daerah	Prov Kepri	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	66,40	5.035.068.956	Program Kepegawaian Daerah	Prov Kepri	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	66,40	5.535.068.956	
			Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,55				Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,55		
			Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	6,53				Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	6,53		
			Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik	99,02				Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik	99,02		
			Persentase ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi	11,54				Persentase ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi	11,54		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas badan maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal dan eksternal. Secara eksternal kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 2.5
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dalam hal ini adalah kebijakan yang diambil oleh Kementerian atau Lembaga yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara.

Visi Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut: **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan 1: **“Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing”**

Melalui tujuan ini Kementerian PANRB melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam

menghadapi revolusi industri 4.0 dan menyikapi era disrupsi. Birokrasi diartikan secara luas yaitu keseluruhan sistem yang menjalankan tugas fungsi negara yaitu lembaga/organisasi, SDM, dan manajemen sektor publik yang diarahkan untuk dapat bersaing dengan kemajuan bangsa dan negara lain di tingkat dunia. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai pelaksanaan RB Nasional yang merupakan gambaran pelaksanaan RB seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Kemenpan RB adalah:

- Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, Responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.
- Sasaran 2 : Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera.
- Sasaran 3 : Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Sasaran 4 : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas.
- Sasaran 5 : Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima
- Sasaran 6 : Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

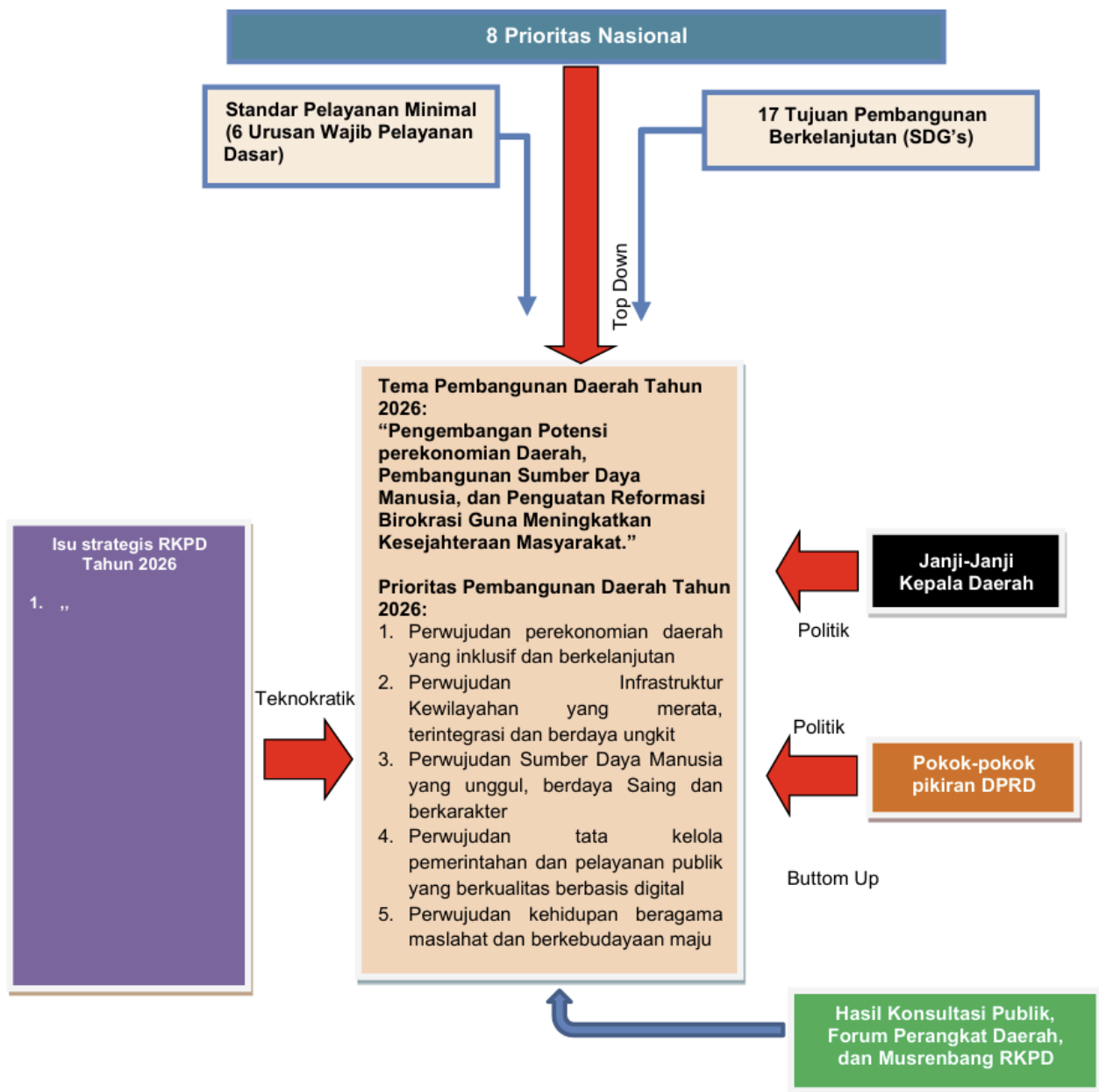
Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi LAN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 1 (satu) yaitu “peningkatan kualitas manusia Indonesia” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 1 (Satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing” dengan **“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan *World Class Government* untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

World class government diwujudkan melalui pengembangan kompetensi aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang Berkualitas. Dalam hal ini, LAN berperan sebagai Lembaga *think tank* yang memberikan saran dan rekomendasi kebijakan dan inovasi administrasi negara, Pengembangan

standar kualitas pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM Aparatur. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Mewujudkan *World Class Government* tentunya harus didasari oleh institusi yang mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21, LAN terus berupaya menghadirkan Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas dan mampu adaptif dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi sehingga mampu melahirkan SDM Aparatur Unggul yang mampu mewujudkan *World Class Government*.

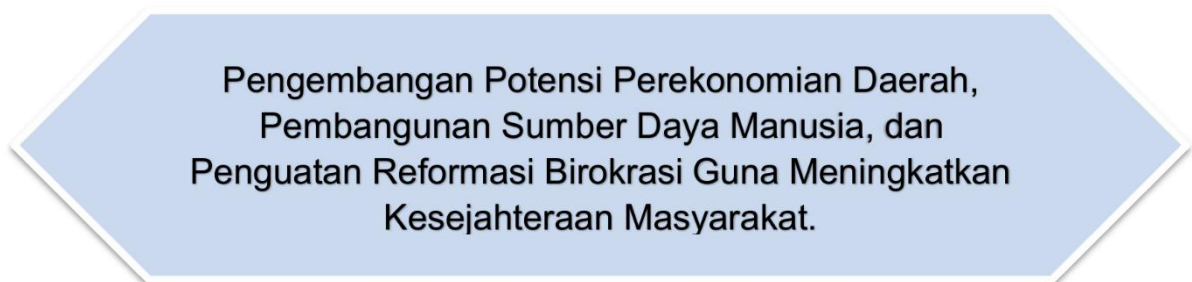
Misi LAN tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
- Misi 2 : Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis *evidence* dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten
- Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi
- Misi 4 : Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik



Gambar 3.1. Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2026 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2026, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD

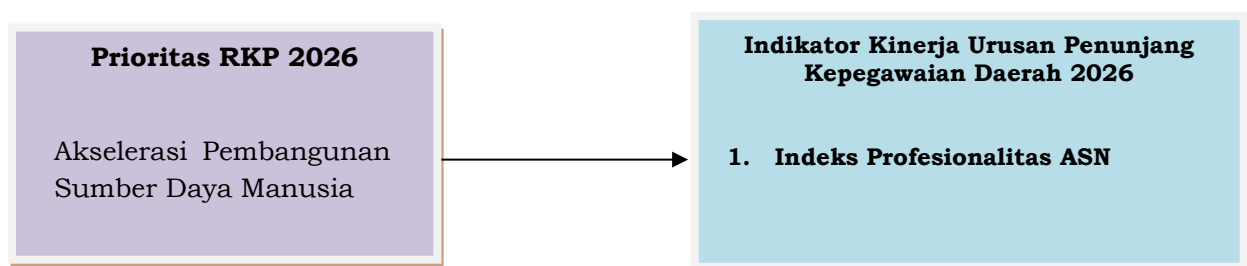
Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau RKPD pada Tahun 2026 yaitu:



Gambar 3.2. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan tema RKPD tersebut, ditetapkan prioritas Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yaitu:

1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan;
2. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana;
3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.



Gambar 3.3. Skema Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Urusan Penunjang Provinsi kepulauan Riau Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pada Renja BKD dan KORPRI sesuai yang tertera dalam Renstra BKD dan KORPRI 2025-2029 yang merupakan salah satu Sasaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 adalah **“Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN.”**

Sasaran pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI sesuai yang tertera dalam Renstra BKD dan KORPRI 2025-2029 adalah **“Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dan akuntabel.”**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada **tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Tabel T-C 32 : Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN			Indeks	81,74			
			Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dan akuntabel	Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi Kualifikasi	Nilai	22,28	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Pengadaan Pegawai berdasarkan sistem merit	38,50

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
				Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi Kinerja	Nilai	25,08		Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	24,00
				Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi Disiplin	Nilai	5,00		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	98,59

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
								Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	99,65
								Persentase ASN yang dibina Karirnya	5,28

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
								Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (UPTD KOMPETENSI)	18,90
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05 (A)

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
								Nilai Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	80,98
								Indeks Kepuasan Masyarakat	86,77 (B)
								Nilai Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (UPTD)	82,17
								Indek Kepuasan Masyarakat (UPTD KOMPETENSI)	81,57 (B)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah, maka dibutuhkan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahunan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Rancangan Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2025-2029 dalam urusan kepegawaian sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan khususnya untuk tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini diusulkan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Kepegawaian Daerah, dan 12 (Dua Belas) Kegiatan, yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini disusun berdasarkan Pagu RKPD Tahun 2026 Provinsi Kepulauan dengan pagu indikatif akhir **Rp. 23.798.473.587,56,- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Enam Rupiah)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Dalam Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini program/kegiatan yang sudah sesuai dengan RKPD baik nomenkelatur kegiatan maupun pagu indikatif kegiatan dan sudah sesuai dengan prioritas dan menyesuaikan isu yang berkembang di bidang kepegawaian.

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disajikan pada **tabel 4.1**.

Tabel 4.1
Tabel T.C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kepulauan Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					KEPEGAWAIAN DAERAH					23.798.473.587,56				23.798.473.587,56
					BKD DAN KORPRI					23.018.473.587,56				23.018.473.587,56
X	X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Provinsi Kepri	80,98	20.348.473.587,56				20.348.473.587,56
						Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Nilai		86,77					
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		81,05 (A)					
X	X	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi BKD dan KORPRI		Provinsi Kepri		70.000.000				70.000.000
X	X	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi Kepri	4	20.000.000	APBD		4	20.000.000
X	X	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	4	30.000.000	APBD		4	30.000.000
X	X	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi Kepri	0	20.000.000	APBD		0	20.000.000
														-
X	X	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	Provinsi Kepri		18.264.689.768,89				18.264.689.768,89

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	X	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Provinsi Kepri	81	17.788.369.768,89	APBD		81	17.788.369.768,89
X	X	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Provinsi Kepri	1	436.320.000	APBD		1	436.320.000,00
X	X	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
		01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	0	20.000.000	APBD		0	20.000.000,00
X	X	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	0	20.000.000	APBD		0	20.000.000,00
		01	1.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
		01	1.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		Provinsi Kepri		10.000.000	APBD			10.000.000
X	X	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	0	10.000.000	APBD		0	10.000.000
X	X	02	1.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	03	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	04	1.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	05	1.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	06	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	X	07	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai		Provinsi Kepri		230.000.000				230.000.000
X	X	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Provinsi Kepri	81	90.000.000	APBD		81	90.000.000
X	X	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Provinsi Kepri	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
X	X	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Provinsi Kepri	81	90.000.000	APBD		81	90.000.000
X	X	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		Provinsi Kepri		620.000.000				620.000.000
X	X	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	X	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	200.000.000	APBD		1	200.000.000
X	X	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X	X	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	40.000.000	APBD		1	40.000.000
X	X	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X	X	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Provinsi Kepri	4	30.000.000	APBD		1	30.000.000
X	X	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Provinsi Kepri	12	30.000.000	APBD		1	30.000.000
X	X	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	4	200.000.000	APBD		1	200.000.000
X	X	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
X	X	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
X	X	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					740.000.000				740.000.000
X	X	01	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Provinsi Kepri	1	600.000.000	APBD		1	600.000.000
X	X	01	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	100.000.000	APBD		2	100.000.000
X	X	01	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri	1	40.000.000	APBD		1	40.000.000
X	X	01	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X 01 1.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumberdaya Listrik, Peralatan Perlengkapann Umum Kantor		Provinsi Kepri		283.783.818,67				283.783.818,67
X X 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X X 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
X X 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri	1	90.000.000	APBD		1	90.000.000
X X 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri	1	123.783.818,67	APBD		1	123.783.819
X X 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tersedianya Jasa Pemeliharaan		Provinsi Kepri		130.000.000,00				130.000.000
X X 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Provinsi Kepri	14	100.000.000,00	APBD		14	100.000.000
X X 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	X	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri	5	20.000.000,00	APBD		5	20.000.000
X	X	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri	1	10.000.000,00	APBD		1	10.000.000
X	X	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	02	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	Nilai	Provinsi Kepri	24,00	2.670.000.000				2.670.000.000
						Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	Nilai		38,50					
						Persentase ASN yang dibina Karirnya	%		5,28					
						Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	%		99,65					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%		98,59					
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terselenggaranya Pengadaan ASN	Dokumen	Provinsi Kepri	3	220.000.000			3	220.000.000
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Provinsi Kepri	0	20.000.000	APBD		0	20.000.000
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Provinsi Kepri	1	90.000.000	APBD		1	90.000.000
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Provinsi Kepri	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Provinsi Kepri	1	40.000.000	APBD		1	40.000.000
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosikan sesuai kualifikasi		Provinsi Kepri		300.000.000				300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	Provinsi Kepri	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	Provinsi Kepri	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Provinsi Kepri	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
														-
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Jumlah Pegawai yang dinilai kompetensinya		Provinsi Kepri		1.950.000.000				1.950.000.000
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Provinsi Kepri	70	95.000.000	APBD		70	95.000.000
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	Provinsi Kepri	1	1.775.000.000	APBD		1	1.775.000.000
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	Provinsi Kepri	159	40.000.000	APBD		175	40.000.000
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	Provinsi Kepri	1	40.000.000	APBD		4	40.000.000
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
														-
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang dievaluasi kinerjanya		Provinsi Kepri		200.000.000				200.000.000
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Provinsi Kepri	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Provinsi Kepri	600	30.000.000	APBD		600	30.000.000
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Provinsi Kepri	500	70.000.000	APBD		500	70.000.000
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Provinsi Kepri	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI				780.000.000				780.000.000
X	X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kepri	81,57	480.000.000				480.000.000
		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks		82,17					
X	X	01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi BKD dan KORPRI	Provinsi Kepri		20.000.000				20.000.000
X	X	01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi Kepri	-	APBD			-
X	X	01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	-	APBD			-
X	X	01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	-	APBD			-
X	X	01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	2	20.000.000	APBD	2	20.000.000
X	X	01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	-	APBD			-
X	X	01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	-	APBD			-
X	X	01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi Kepri	-	APBD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		Provinsi Kepri		20.000.000				20.000.000
X X 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X X 02 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 03 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 04 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 05 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 06 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 07 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai		Provinsi Kepri		70.000.000				70.000.000
X X 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Provinsi Kepri	0	50.000.000	APBD		0	50.000.000
X X 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN					Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Provinsi Kepri	2	20.000.000	APBD		2	20.000.000
X X 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		Provinsi Kepri		220.000.000				220.000.000
X X 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	1	10.000.000	APBD		1	10.000.000
X X 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	3	50.000.000	APBD		3	50.000.000
X X 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X X 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	2	15.000.000	APBD		2	15.000.000
X X 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Provinsi Kepri	0	20.000.000	APBD		0	20.000.000
X X 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Provinsi Kepri	4	25.000.000	APBD		4	25.000.000
X X 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
X X 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	0	15.000.000	APBD		0	15.000.000
X X 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Provinsi Kepri	0	15.000.000	APBD		0	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									100.000.000				100.000.000
X X 01 1.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Provinsi Kepri	0	50.000.000	APBD		0	50.000.000
X X 01 1.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					JumlahUnitKendaraanDinasOperasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 3	Pengadaan Alat Besar					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 5	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepri	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
X X 01 1.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
X X 01 1.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumberdaya Listrik, Peralatan Perlengkapann Umum Kantor		Provinsi Kepri		20.000.000				20.000.000
X X 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	X	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan		Provinsi Kepri		30.000.000				30.000.000
X	X	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Provinsi Kepri	0	10.000.000	APBD		0	10.000.000
X	X	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri	0	10.000.000	APBD		0	10.000.000
X	X	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X	X	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri	0	10.000.000	APBD		0	10.000.000
X X 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepri		-	APBD			-
X X 02 1.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Provinsi Kepri		-	APBD			-
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural	%		18,90	300.000.000				300.000.000
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN					Tersedianya Jumlah Pegawai yang dinilai kompetensinya			500	300.000.000			500	300.000.000
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Provinsi Kepri	5	50.000.000	APBD		5	50.000.000
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>					Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	Provinsi Kepri	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Renja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025- 2029.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 baik dalam lingkup program maupun kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya atau (n+1).

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang urusan kepegawaian. Ranhir Renja Tahun 2026 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya pelayanan kepegawaian baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kab/Kota se-

Provinsi Kepulauan Riau maupun Aparatur Sipil/Militer lainnya yang akan meminta pelayanan, sehingga dapat terwujud tugas BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yaitu “membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi”.

